Pekalongan
City Of Crafts and Folk Art

unesco
Member of
Creative Cities Network

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Rancangan Akhir

RENCANA KERJA 2027

BKPSDM Kota Pekalongan

















(0285) 412522
bkpsdm.pekalongankota.go.id
Jl. Majapahit no.4, Podosugih

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan Tahun 2027 telah disusun. Penyusunan Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 dan telah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Renja ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kota Pekalongan yang disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif. Selanjutnya Renja akan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setelah melalui proses pembahasan dan penyepakatan menjadi KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2027. Kami menyadari Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan Tahun 2027 ini ada kekurangan, sehingga masukan, saran dan koreksi semua pihak akan menjadi perbaikan dalam penyusunan Renja pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya Renja BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2027 ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik agar dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan.

Pekalongan, 17 Juli 2026
KEPALA BKPSDM
KOTA PEKALONGAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19720913 199803 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 39
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 40
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 51
BAB V PENUTUP 56
5.1 Catatan Penting 56
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 56
5.3 Rencana Tindak Lanjut 57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d (2025) 13
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 18
Tabel 2.3 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai BKPSDM Kota Pekalongan.....18
Tabel 2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana BKPSDM Kota Pekalongan.....19
Tabel 3.1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional.....40
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 2027 41
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2027 52
Table T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Pekalongan 23
Table T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 BKPSDM Kota Pekalongan.....29
Table T-C.32 Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kota Pekalongan 38
Table T-C.33 Rumusan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 BKPSDM Kota Pekalongan 44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diimplementasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 27), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui partisipasi masyarakat, yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah mencakup kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, serta dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan, yang menjadi bahan utama perencanaan pembangunan tahunan sekaligus menggambarkan prakiraan maju pelaksanaannya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan aturan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan, rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Pekalongan. Penyusunan ini dilakukan melalui proses koordinasi antar Bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan, konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah terkait di Kota Pekalongan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pekalongan tahun 2027 didasarkan kepada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka

   Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);
18. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara;
19. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 5);
21. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan Tahun 2027 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

   Dokumen Renja BKPSDM Kota Pekalongan disusun dengan maksud sebagai arah dan pedoman bagi BKPSDM Kota Pekalongan dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan

   Dokumen Renja BKPSDM Kota Pekalongan disusun bertujuan antara lain untuk:

   a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan BKPSDM Kota Pekalongan untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
   b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
   c. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
   d. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
   e. Menjalankan tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini dibagi menjadi lima bagian pembahasan, yaitu :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan

pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, tantangan dan peluang, dampak terhadap visi/misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional/ internasional serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada bagian ini, perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

3.3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, penjelasan jika rumusan program/ kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana kerja dan pendanaan indikatif perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Pekalongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Pekalongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Pekalongan selama tahun 2025 dan perkiraan target tahun 2026.

Pengukuran kinerja kegiatan/sub kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025 BKPSDM Kota Pekalongan sebesar Rp 6.527.612.000,- termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN dengan melaksanakan 3 penunjang urusan pemerintahan, 3 program, 12 kegiatan dan 35

sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp5.676.379.101,- atau sebesar 86,96%.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2026, dengan alokasi pagu anggaran Belanja sebesar Rp4.085.307.000,- (belanja gaji dan tunjangan Rp3.280.107.000,-) melaksanakan 3 unsur penunjang urusan pemerintahan, 3 program, 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian fisiknya.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2025, serta proyeksi capaian tahun 2026, terdapat sejumlah permasalahan yang diidentifikasi dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan BKPSDM Kota Pekalongan, antara lain sebagai berikut:

1. Usulan kebutuhan pengembangan kompetensi melalui mekanisme biaya instansi pengirim menunggu proses pemanggilan dari penyelenggara pendidikan sesuai ketersediaan kuota peserta. Namun demikian, hambatan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap capaian kinerja, karena secara keseluruhan target pengembangan kompetensi ASN tetap dapat dicapai sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan;
2. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
3. Koordinasi antar *stakeholder* dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang belum maksimal;
4. Komitmen dan pemahaman bersama untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD perlu ditingkatkan dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BKPSDM dalam pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2), dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BKPSDM Kota Pekalongan yang sudah dilakukan *mapping* berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019, didasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Capaian evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d (2025)
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2025	Tahun 2025		Realisasi Capaian RPJMD s/d Tahun 2025	Persentase Capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2025	Realisasi 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**									
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	116,87	100	116,87	116,87	116,87	Tercapai
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	98	100	98	98	98,00	Tidak Tercapai
	persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	110	100	110	110	110,00	Tercapai
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Persentase Ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	100	117,06	100	117,06	117,06	117,06	Tercapai
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	100	0	0	0	0	0,00	Tidak Tercapai
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	100	96,19	100	96,19	96,19	96,19	Tidak Tercapai
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2025	Tahun 2025		Realisasi Capaian RPJMD s/d Tahun 2025	Persentase Capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2025	Realisasi 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	110	100	110	110	110,00	Tercapai
II	**Program Kepegawaian Daerah**									
	Persentase Keterisian Jabatan	persen	90	90	96,91	90	96,91	96,91	107,67	Tercapai
	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	persen	80	80	86,73	80	86,73	86,73	108,42	Tercapai
	Persentase PNS berkembang karier	persen	80	50	123,33	80	123,33	123,33	154,17	Tercapai
	Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	persen	100	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									
	Persentase ketersediaan data PNS	persen	100	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai
2	Mutasi dan Promosi ASN									
	Persentase Ketersediaan Data Mutasi dan Promosi ASN	persen	90	110	93	90	93	93	103,33	Tercapai
3	Pengembangan Kompetensi ASN									
	Persentase PNS berkembang kompetensinya (Diklat teknis dan Latpim)	persen	42	42	50,38	42	50,38	50,38	119,96	Tercapai
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
	Tingkat Disiplin ASN	persen	100	100	99,9	100	99,9	99,9	99,90	Tidak Tercapai
III	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**									
	Persentase PNS berkembang kompetensinya	persen	100	100	106,9	100	106,9	106,9	106,90	Tercapai
1	Pengembangan Kompetensi Teknis									

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2025	Tahun 2025		Realisasi Capaian RPJMD s/d Tahun 2025	Persentase Capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2025	Realisasi 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase penyelenggaraan, pembinaan, pengoordinasian fasiltasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis, umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	persen	100	100	105,88	100	105,88	105,88	105,88	Tercapai
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional									
	Cakupan penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	orang	250	207	214	250	214	214	85,60	Tidak Tercapai

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah memuat kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK). Dalam hal ini, pelayanan di bidang kepegawaian sudah ditetapkan NSPKnya melalui Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang NSPK Manajemen ASN, serta diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN. Oleh karena itu, tolok ukur dan indikator kinerja pelayanan pada BKPSDM Kota Pekalongan disusun dengan mengacu pada ketentuan tersebut dan diselaraskan dengan indikator kinerja utama yang tercantum dalam Rencana Strategis BKPSDM sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan.

1. Tugas dan Fungsi

   Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

   BKPSDM mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan unsur penunjang yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan pengembangan SDM yang menjadi kewenangan daerah di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BKPSDM menyelenggarakan fungsi:

   a. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang kepegawaian dan pengembangan SDM;
   b. Perumusan kebijakan bidang kepegawaian dan pengembangan SDM;
   c. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengadaan, informasi dan pembinaan pegawai;

d. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang mutasi dan promosi ASN;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengembangan SDM dan kompetensi ASN;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
g. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
h. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Untuk mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Adapun Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat
    1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengadaan, Informasi dan Pembinaan Pegawai;
d. Bidang Mutasi dan Promosi ASN;
e. Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi ASN;

f. UPTB; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Kondisi Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan didukung sumber daya manusia sejumlah 38 orang terdiri dari 37 orang Aparatur Sipil Negara dan 1 orang non ASN. Berdasarkan data Simpeg BKPSDM Kota Pekalongan, untuk jumlah ASN dapat diperinci sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (ORANG)						TOTAL (ORANG)
		II	III	IV	P3K	P3KPW	NON ASN	
1	Sekretariat	2	5	2	1	7	0	17
2	Pengadaan, Informasi dan Pembinaan Pegawai	0	4	1	1	1	0	7
3	Pengembangan SDM dan Kompetensi ASN	0	3	1	1	1	0	6
4	Mutasi dan Promosi ASN	0	7	0	0	0	1	8
JUMLAH		**2**	**19**	**4**	**3**	**9**	**1**	**38**

Sumber: BKPSDM Kota Pekalongan, Juni 2026

Dari jumlah total pegawai tersebut, untuk jumlah pegawai BKPSDM berdasarkan kualifikasi pendidikan dan berdasarkan jumlah yang menduduki jabatan dapat dilihat dari diagram dan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai BKPSDM Kota Pekalongan

NO	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN							GENDER		TOTAL (ORANG)
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	L	P	
1	Sekretariat	1	0	6	3	4	3	0	12	5	17
2	Pengadaan, Informasi dan Pembinaan Pegawai	0	0	0	1	4	2	0	2	5	7
3	Pengembangan SDM dan Kompetensi ASN	0	0	0	0	5	1	0	4	2	6
4	Mutasi dan Promosi ASN	0	0	1	0	5	2	0	3	5	8
JUMLAH		**1**	**0**	**7**	**4**	**18**	**8**	**0**	**21**	**17**	**38**

Sumber: BKPSDM Kota Pekalongan, Juni 2026

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, BKPSDM Kota Pekalongan telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Beberapa jenis Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pekalongan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana BKPSDM Kota Pekalongan

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	A.C. Sentral	1	Unit
2	A.C. Split	12	Unit
3	A.C. Window	21	Unit
4	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	Unit
5	Alat Pemadam/Portable	3	Unit
6	Alat Penghancur Kertas	2	Unit
7	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain	2	Unit
8	Audio Amplifier	1	Unit
9	Audio Mixing Portable	1	Unit
10	Bangku Tunggu	2	Unit
11	Bracket Standing Peralatan	1	Unit
12	Brandkas	1	Unit
13	Camera + Attachment	1	Unit
14	Camera Digital	1	Unit
15	Camera Electronic	1	Unit
16	Capture Card	2	Unit
17	CCTV - Camera Control Television System	1	Unit
18	Dispenser	5	Unit
19	Facsimile	1	Unit
20	Filing Cabinet Besi	18	Unit
21	Gordyin/Kray	80	Unit
22	Handy Cam	1	Unit
23	Hard Disk	1	Unit
24	Headphone	2	Unit
25	Infrared Thermometer	1	Unit
26	Kabel Listril	2	Unit
27	Kipas Angin	22	Unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
28	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Unit
29	Kursi Besi/Metal	75	Unit
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	Unit
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	19	Unit
33	Kursi Rapat	163	Unit
34	Kursi Tamu	1	Unit
35	Kursi Tangan	2	Unit
36	Lap Top	11	Unit
37	Lemari Besi/Metal	14	Unit
38	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1	Unit
39	Lemari Es	1	Unit
40	Lemari Kaca	1	Unit
41	Lemari Kayu	4	Unit
42	Lemari Pakaian	22	Unit
43	Local Area Network (LAN)	1	Unit
44	Loudspeaker	3	Unit
45	Megaphone	3	Unit
46	Meja Kerja Besi/Metal	1	Unit
47	Meja Kerja Kayu	2	Unit
48	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	25	Unit
49	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
50	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit
51	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	Unit
52	Meja Komputer	1	Unit
53	Meja Makan Besi	2	Unit
54	Meja Rapat	44	Unit
55	Meja Resepsionis	1	Unit
56	Mesin Absensi	3	Unit
57	Mesin Bor Tangan	1	Unit
58	Mesin Gerinda Tangan	1	Unit
59	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	2	Unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
60	Mesin Pemotong Rumput	2	Unit
61	Microphone	6	Unit
62	Microphone/Wireless MIC	4	Unit
63	Mimbar/Podium	1	Unit
64	Modem	1	Unit
65	Monitor	2	Unit
66	Note Book	14	Unit
67	P.C Unit	8	Unit
68	Papan Nama Instansi	1	Unit
69	Papan Pengumuman	1	Unit
70	Papan Visual/Papan Nama	1	Unit
71	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	Unit
72	Peralatan OlahRaga Lainnya lain-lain	1	Unit
73	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1	Unit
74	Pompa Lain-lain	2	Unit
75	Portable Generating Set	1	Unit
76	Power Amplifier	1	Unit
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	Unit
78	Proyektor + Attachment	4	Unit
79	Rak Besi	13	Unit
80	Rak Kayu	2	Unit
81	Rak Piring Aluminium	1	Unit
82	Rotary Filling	4	Unit
83	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	4	Unit
84	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit
85	Sepeda Motor	11	Unit
86	Server	1	Unit
87	Set Studio Light Signal	1	Unit
88	Sofa	2	Unit
89	Sound System	2	Unit
90	Station Wagon	2	Unit
91	Telephone (PABX)	1	Unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
92	Televisi	6	Unit
93	Tempat Tidur Besi	42	Unit
94	Tempat Tidur Kayu	12	Unit
95	Thermometer Badan	2	Unit
96	Tikar	1	Unit
97	Treng Air/Tandon Air	1	Unit
98	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Unit
99	White Board	2	Unit
100	Wireless	3	Unit
101	Wireless Access Point	1	Unit

Sumber: BKPSDM Kota Pekalongan, Rekon Aset Semester 2 Tahun 2025, 2025

5. Permasalahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Pada awal perencanaan anggaran, cukup banyak usulan yang disampaikan baik oleh internal bidang maupun stakeholder terkait terutama ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi hanya sebagian saja yang dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran sehingga berdasarkan penentuan skala prioritas dan kebijakan yang ada.

Pada tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekalongan telah melaksanakan 2 (dua) program strategis dan 1 (satu) program penunjang yang dijabarkan dalam 12 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan pencapaian sasaran sebagai berikut:

a. Nilai Sakip OPD

Penilaian didasarkan atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang meliputi laporan kinerja instansi pemerintah, rencana aksi, perjanjian kinerja dan capaian kinerja OPD pada tingkat kota,

provinsi maupun nasional. Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh inspektorat, BKPSDM mendapat nilai 84 dari target 84 atau ketercapaiannya 100%.

b. Persentase Laporan SKP ASN tepat waktu

Persentase pelaporan Kinerja ASN dengan target 90% realisasi 100% dengan ketercapaian 111,11%.

c. Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya dengan target 40 % yang dihitung dengan formulasi Jumlah pegawai yang mengikuti diklat / Jumlah pegawai yang potensial x 100%, untuk capaian pada tahun 2025 sebesar 125,96 %.

Adapun hasil analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 3 sebagai berikut :

Table T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Sakip OPD			81,5	83	84,5	86	87,5	83,2	84	84,02	84,04	Indeks
2	Persentase Laporan SKP ASN tepat waktu			86	87	88	89	90	99,97	100	N/A	N/A	Persen
3	Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya			40	40	40	40	40	75,18	50,38	N/A	N/A	Persen

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada Pemerintah Kota Pekalongan, BKPSDM Kota Pekalongan telah menyusun program kerja dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi dan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. Dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, BKPSDM Kota Pekalongan mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu **"Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945"** dengan Tujuan "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945".

Sebagai upaya mengukur keberhasilan pelayanan BKPSDM Kota Pekalongan menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator Kinerja dan capaian yang dihasilkan pada tahun 2025 sebagai berikut:

1) Nilai Sakip OPD 84 dengan capaian 100%
2) Persentase Laporan SKP ASN Tepat Waktu 100% dengan capaian 111,11%
3) Persentase Jumlah ASN Yang Meningkat Kompetensinya 50,38% dengan capaian 125,96%

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai organisasi perangkat daerah senantiasa berupaya untuk menegaskan bahwa manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia bukanlah kegiatan yang bersifat insidental, melainkan merupakan bagian dari perencanaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Selama menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi BKPSDM, antara lain:

1. Belum tersedianya profil kompetensi ASN secara menyeluruh berdasarkan hasil penilaian potensi, kompetensi dan kinerja berikut analisis kesenjangannya;

2. Belum optimalnya peningkatan profesionalisme kompetensi ASN yang disebabkan karena kurangnya motivasi ASN dalam pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan;
3. Masih adanya pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian ASN menjadi salah satu tantangan serius dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Belum optimalnya pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional dikarenakan belum optimalnya penyusunan dokumen hasil analisa kesenjangan kebutuhan pengembangan kompetensi dengan standar kompetensi jabatan setiap pegawai, kurangnya motivasi dari ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun dan keterbatasan fasilitasi pengembangan kompetensi yang sesuai kebutuhan organisasi.

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi

Pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, dalam hal ini BKPSDM Kota Pekalongan, memegang peranan penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja untuk mencapai tujuan pemerintah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai kinerja terbaik oleh BKPSDM Kota Pekalongan akan berdampak langsung pada pencapaian kinerja yang telah ditetapkan

Terkait dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan tahun 2025-2029 kinerja BKPSDM Kota Pekalongan berdampak pada pencapaian misi “Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945”.

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi BKPSDM, organisasi menghadapi sejumlah tantangan, antara lain :

a. Ketersediaan data profil kompetensi ASN yang lengkap dan terintegrasi, termasuk hasil penilaian potensi, kompetensi, dan kinerja, serta analisis kesenjangan yang akurat, untuk mendukung pengembangan kompetensi yang tepat sasaran;
b. Mendorong ASN untuk mengikuti pendidikan lanjutan yang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing;
c. Pengembangan kompetensi bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga hak ASN yang dijamin oleh Undang – Undang minimal 20 Jam Pelajaran tiap tahun;
d. *Learning Management System* dirancang khusus untuk mendukung proses pembelajaran dan penyediaan konten pembelajaran secara online sehingga pelatihan akan lebih efektif dan efisien. Saat ini LMS sudah digunakan, namun masih terus dikembangkan. Beberapa fitur dan konten pembelajaran online belum sepenuhnya tersedia, sehingga efektivitas dan efisiensi pelatihan masih dapat ditingkatkan.

Selain itu tantangan yang mendasar dan kerangka penentuan arah pembangunan Kota Pekalongan adalah terkait urusan kepegawaian. Dalam menghadapi tantangan tersebut diperlukan kajian dan analisis kinerja pelayanan kepada ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan kepada ASN yang dibutuhkan.

Peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di Kota Pekalongan antara lain :

a. Data yang sudah mulai tersedia dapat digunakan untuk menyusun rencana pengembanagn kompetensi yang lebih tepaat sasaran;
b. Pengembangan kompetensi melalui magang, pertukaran pegawai, pembelajaran jarak jauh, coaching dan mentoring merupakan upaya untuk mereduksi besarnya biaya pengembangan kompetensi pegawai;
c. Terbukanya pengembangan kapasitas BKPSDM melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, dan lembaga penyelenggara pelatihan;

d. Pengembangan kompetensi pegawai di Kota Pekalongan dapat dilakukan secara efektif melalui kelas online dan blended learning, yang menawarkan fleksibilitas, efisiensi waktu dan biaya, peningkatan keterampilan digital, serta pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan mendukung transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

2.3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan dan pengidentifikasian isu-isu yang tepat, cermat yang bersifat strategis sangat penting sekali karena merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa yang akan datang. Oleh karena itu isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu mendapatkan perhatian lebih karena merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan telaahan identifikasi permasalahan yang ada, perumusan isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan profil kompetensi ASN, penilaian potensi, kompetensi dan kinerja untuk mendukung pengembangan kompetensi yang tepat sasaran;
2. Mendorong ASN untuk mengikuti pendidikan lanjutan yang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing;
3. Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan kompetensi teknis melalui *Learning Management System* (LMS) guna memfasilitasi pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dengan disusunnya Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan tahun 2027, telah dirumuskan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BKPSDM Kota Pekalongan tahun 2027 akan tetapi, seiring berjalannya waktu

dengan membandingkan rumusan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan OPD, terdapat perbedaan yang menyebabkan perubahan perumusan kebutuhan tersebut. Perubahan rumusan kebutuhan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih efisien, efektif dan optimal. Perubahan tersebut antara lain anggaran pagu kegiatan dan penyesuaian target dan indikator kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut :

Table T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 BKPSDM Kota Pekalongan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					**4.055.477.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**3.985.081.000**	Penyesuaian pagu anggaran sesuai pagu indikatif
I.1	**URUSAN KEPEGAWAIAN**				**4.031.398.000**	**URUSAN KEPEGAWAIAN**				**3.961.002.000**	Penyesuaian pagu anggaran sesuai pagu indikatif
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**3.887.784.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**3.764.388.000**	Penyesuaian pagu anggaran sesuai pagu indikatif
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**100 Persen**				**Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**		
			Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	**100 Persen**				**Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah**	**100 Persen**		
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian perencanaan,**	**100 Persen**	**13.782.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian perencanaan,**	**100 Persen**	**13.782.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**			**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.470.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.470.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.010.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.010.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	10.302.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	10.302.000	
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**3.280.987.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**3.169.197.000**	Penyesuaian pagu anggaran sesuai pagu indikatif
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	3.280.107.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3.168.317.000	Penyesuaian pagu anggaran sesuai pagu indikatif
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	880.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	880.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Keuangan Akhir Tahun SKPD								
C	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 Persen**	**124.393.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 Persen**	**109.169.000**	Penyesuaian pagu anggaran sesuai pagu indikatif
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.533.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.533.000	
2	Penyediaan peralatan rumah tangga	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	910.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	910.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	17.423.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	17.423.000	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.248.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.248.000	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	95.279.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	80.055.000	Penyesuaian target dan pagu anggaran sesuai pagu indikatif
D	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**425.492.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**429.110.000**	Penyesuaian pagu anggaran sesuai pagu indikatif sehubungan dengan penyesuaian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											alokasi belanja pegawai
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	800.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	164.010.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	164.010.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	260.682.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	264.300.000	Penyesuaian pagu anggaran sesuai pagu indikatif sehubungan dengan penyesuaian alokasi belanja pegawai
E	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**43.130.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**43.130.000**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	30.498.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	30.498.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kendaraan Dinas Jabatan					atau Kendaraan Dinas Jabatan					
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.067.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.067.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4.565.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4.565.000	
II	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase keterisian jabatan manajerial ASN**	**95 Persen**	**143.614.000**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase keterisian jabatan manajerial ASN**	**95 Persen**	**196.614.000**	Penyesuaian target dan pagu anggaran sesuai pagu indikatif
			Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	**73 Persen**				**Persentase Keterpenuhan Formasi ASN**	**73 Persen**		
			Persentase peningkatan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan	**27 Persen**				**Persentase peningkatan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan**	**27 Persen**		
			Persentase Pegawai dengan SKP bernilai minimal Baik	**95 Persen**				**Persentase Pegawai dengan SKP bernilai minimal Baik**	**95 Persen**		
A	**Pengadaan, Pemberhentian dan**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase ketersediaan data ASN**	**100 Persen**	**33.871.000**	**Pengadaan, Pemberhentian dan**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase ketersediaan data ASN**	**100 Persen**	**33.871.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Informasi Kepegawaian ASN					**Informasi Kepegawaian ASN**					
1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	2.023.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	2.023.000	
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	31.848.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	31.848.000	
B	**Mutasi dan Promosi ASN**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase ketersediaan data talent pool atau pemetaan talenta ASN**	**85 Persen**	**103.524.000**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase ketersediaan data talent pool atau pemetaan talenta ASN**	**85 Persen**	**120.024.000**	Penyesuaian pagu anggaran sesuai pagu indikatif sehubungan dengan penyesuaian kebutuhan belanja honorarium
1	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	87.235.000	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	87.235.000	Penyesuaian target sehubungan dengan penerapan manajemen talenta dalam pengelolaan mutasi dan promosi ASN
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12 Dokumen	7.137.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12 Dokumen	23.637.000	Penyesuaian pagu anggaran sesuai pagu indikatif sehubungan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											dengan penyesuaian kebutuhan belanja honorarium
3	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	9.152.000	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	9.152.000	Penyesuaian target sehubungan dengan penerapan manajemen talenta dalam pengelolaan mutasi dan promosi ASN
C	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase ASN yang berkembang kompetensinya**	**100 Persen**	**-**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase ASN yang berkembang kompetensinya**	**100 Persen**	**20.000.000**	Penyediaan alokasi anggaran dalam rangka pemberian beasiswa studi lanjut bagi ASN tenaga kesehatan dan guru ASN sesuai program prioritas Kepala Daerah
1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-	-	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	4 Orang	20.000.000	Penyediaan alokasi anggaran dalam rangka pemberian beasiswa studi lanjut bagi ASN tenaga kesehatan dan guru ASN sesuai program prioritas Kepala Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
D	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Tingkat Disiplin ASN**	**100 Persen**	**6.219.000**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Tingkat Disiplin ASN**	**100 Persen**	**22.719.000**	Penyesuaian pagu anggaran sesuai pagu indikatif sehubungan dengan penyesuaian kebutuhan belanja honorarium
1	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang	650.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang	650.000	
2	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1 Orang	5.569.000	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1 Orang	22.069.000	Penyesuaian pagu anggaran sesuai pagu indikatif sehubungan dengan penyesuaian kebutuhan belanja honorarium
II. 2	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**24.079.000**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**24.079.000**	
III	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase ASN berkembang kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional**	**55 Persen**	**24.079.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase ASN berkembang kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional**	**55 Persen**	**24.079.000**	
A	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase ASN berkembang kompetensi teknis**	**100 Persen**	**16.575.000**	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Persentase ASN berkembang kompetensi teknis**	**100 Persen**	**16.575.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1000 Orang	16.575.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1000 Orang	16.575.000	
B	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Presentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi fungsional, kepemimpinan dan prajabatan**	**7 Persen**	**7.504.000**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**Presentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi fungsional, kepemimpinan dan prajabatan**	**7 Persen**	**7.504.000**	
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	7.504.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	7.504.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan disusunnya Rancangan Akhir RKPD Kota Pekalongan Tahun 2027, telah dirumuskan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BKPSDM Kota Pekalongan tahun 2027 akan tetapi, seiring berjalannya waktu dengan membandingkan rumusan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan OPD, terdapat perbedaan yang menyebabkan perubahan perumusan kebutuhan tersebut.

Perubahan rumusan kebutuhan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih efisien, efektif dan optimal juga terdapat usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2027 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Table T-C.32
Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027
Kota Pekalongan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, tema dan prioritas pembangunan daerah harus diselaraskan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2027 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2027, yang merupakan bagian dari pelaksanaan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025–2029.

Selain mengacu pada dokumen perencanaan daerah, penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2027 juga memperhatikan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKP) Tahun 2027. Adapun Tema RKP Tahun 2027 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri". Pembangunan nasional pada tahun tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) klaster utama Program Prioritas Kementerian dan Program Nasional (PKPN), yaitu 1. Kedaulatan Pangan, 2. Kemandirian Energi dan Air, 3. Pendidikan, 4. Kesehatan, 5. Hilirisasi dan Industrialisasi, 6. Infrastruktur dan Perumahan, 7. Ekonomi Kerakyatan dan Desa, 8. Penurunan Kemiskinan.

Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan untuk periode RPJMD 2025–2029 ditujukan pada kebijakan: “Penguatan Fondasi Perwujudan Mina Batik”. Sejalan dengan arah tersebut, prioritas pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2027 difokuskan pada “Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah disertai dengan sistem peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat”.

Penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang ada pada BKPSDM Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	1	Penguatan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi kinerja, integritas, manajemen talenta, transformasi arsitektur dan kolaborasi digital, BMD, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan Tahun 2027 berpedoman dan mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini menjabarkan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu Rencana Strategis BKPSDM yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja juga sudah disusun untuk jangka waktu 2025-2029.

Sehubungan hal tersebut, maka penyusunan Rencana Kerja BKPSDM mengacu pada RPJMD 2025-2029. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2027 dan didasarkan pada Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Lima Tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2025-2045. Rencana Kerja BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2027 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau acuan bagi semua bidang dan sekretariat di BKPSDM dalam menjalankan tugas dan

fungsinya. Selain itu juga, renja ini dimaksudkan sebagai bahan untuk mengevaluasi diri dalam meningkatkan kinerja BKPSDM.

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Pekalongan, yang hendak dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan tujuan dan sasaran ini didasarkan pada hasil identifikasi isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factors*) yang telah dirumuskan setelah penetapan visi dan misi.

Tujuan merupakan arah strategis yang ingin dicapai dan menjadi dasar perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Sementara itu, sasaran menggambarkan kondisi terukur yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terperinci, realistis, dan sesuai dengan tujuan organisasi.

Adapun tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Pekalongan, telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan

   Meningkatkan kualitas manajemen ASN dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik

2. Sasaran
   a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
   b. Meningkatnya tata kelola manajemen ASN
   c. Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi ASN

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja 2027

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	SATUAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan kualitas manajemen ASN dalam rangka peningkatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) OPD	99,58	Indeks	
		Nilai SAKIP OPD	84,04	Nilai	
	Meningkatnya tata kelola manajemen ASN	Indeks Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara (Merit Sistem)	0,82	Indeks	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	SATUAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
kualitas layanan publik		Rata-rata skor nilai merit sistem komponen manajemen ASN	3,39	Skor	
	Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi ASN	Indeks Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara (Merit Sistem)	0,82	Indeks	
		Rata-rata skor nilai sistem merit komponen pengembangan kompetensi ASN	3,25	Skor	

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan, serta memperoleh alokasi anggaran. Selain itu, program juga dapat berupa kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah merupakan bagian dari rencana kerja tahunan yang dirumuskan berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, relevansi, kebutuhan, serta kemampuan anggaran. Perumusan tersebut dilakukan untuk menjawab isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan terarah.

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahap ini merupakan hasil penyesuaian antara identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil analisis dengan arah prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD. Perumusan tersebut juga mempertimbangkan hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, kebijakan provinsi, serta kebijakan pemerintah daerah.

Rencana kerja tahun 2027 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasarannya. Hal ini terlihat dari beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar

masih dilaksanakan pada tahun 2027. Pada prinsipnya program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 adalah sebanyak 3 program, 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan jumlah pagu Rp. 3.985.081.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2027 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Table T-C.33
Rumusan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 BKPSDM Kota Pekalongan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					**3.985.081.000**				**8.004.634.000**
05.03	**KEPEGAWAIAN**				**3.961.002.000**	**DAU**			**6.184.634.000**
05.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**100 Persen**	**3.764.388.000**	**DAU**		**100 Persen**	**5.125.024.000**
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		**100 Persen**				**100 Persen**	
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah		**100 Persen**				**100 Persen**	
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**100 Persen**	**13.782.000**	**DAU**		**100 Persen**	**30.727.000**
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kota Pekalongan	2 Dokumen	1.470.000	DAU		2 Dokumen	3.780.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPSDM Kota Pekalongan	2 Dokumen	2.010.000	DAU		2 Dokumen	3.757.000
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kota Pekalongan	15 Laporan	10.302.000	DAU		15 Laporan	23.190.000
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**100 Persen**	**3.169.197.000**	**DAU**		**100 Persen**	**4.259.347.000**
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	28 Orang/bulan	3.168.317.000	DAU		29 Orang	4.257.597.000
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kota Pekalongan	1 Laporan	880.000	DAU		1 Laporan	1.750.000
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**100 Persen**	**109.169.000**	**DAU**		**100 Persen**	**216.750.000**
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kota Pekalongan	4 Paket	6.533.000	DAU		4 Paket	32.000.000
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BKPSDM Kota Pekalongan	4 Paket	910.000	DAU		4 Paket	2.750.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kota Pekalongan	4 Paket	17.423.000	DAU		4 Paket	42.000.000
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BKPSDM Kota Pekalongan	2 Paket	4.248.000	DAU		2 Paket	8.000.000
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kota Pekalongan	40 Laporan	80.055.000	DAU		125 Laporan	132.000.000
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**100 Persen**	**429.110.000**	**DAU**		**100 Persen**	**452.200.000**
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kota Pekalongan	4 Laporan	800.000	DAU		4 Laporan	2.200.000
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKPSDM Kota Pekalongan	12 Laporan	164.010.000	DAU		12 Laporan	220.000.000
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kota Pekalongan	12 Laporan	264.300.000	DAU		12 Laporan	230.000.000
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**100 Persen**	**43.130.000**	**DAU**		**100 Persen**	**166.000.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BKPSDM Kota Pekalongan	11 Unit	30.498.000	DAU		13 Unit	52.000.000
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM Kota Pekalongan	1 Unit	8.067.000	DAU		2 Unit	103.000.000
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM Kota Pekalongan	4 Unit	4.565.000	DAU		10 Unit	11.000.000
05.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase keterisian jabatan manajerial ASN**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**95 Persen**	**196.614.000**	**DAU**		**95 Persen**	**1.059.610.000**
		Persentase Keterpenuhan Formasi ASN		**73 Persen**				**75 Persen**	
		Persentase peningkatan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan		**27 Persen**				**27 Persen**	
		Persentase Pegawai dengan SKP bernilai minimal Baik		**95 Persen**				**95 Persen**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase ketersediaan data ASN**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**100 Persen**	**33.871.000**	**DAU**		**100 Persen**	**435.000.000**
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kota Pekalongan	1 Dokumen	2.023.000	DAU		1 Dokumen	300.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kota Pekalongan	12 Dokumen	31.848.000	DAU		12 Dokumen	135.000.000
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase ketersediaan data talent pool atau pemetaan talenta ASN**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**85 Persen**	**120.024.000**	**DAU**		**85 Persen**	**430.210.000**
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	BKPSDM Kota Pekalongan	4 Dokumen	87.235.000	DAU		1 Dokumen	360.950.000
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	12 Dokumen	23.637.000	DAU		12 Dokumen	36.650.000
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kota Pekalongan	4 Dokumen	9.152.000	DAU		1 Dokumen	32.610.000
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase ASN yang berkembang kompetensinya**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**100 Persen**	**20.000.000**	DAU		**100 Persen**	**88.900.000**
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	BKPSDM Kota Pekalongan	4 Orang	20.000.000	DAU		4 Orang	88.900.000
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Tingkat Disiplin ASN**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**100 Persen**	**22.719.000**	**DAU**		**100 Persen**	**105.500.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	BKPSDM Kota Pekalongan	10 Orang	650.000	DAU		10 Orang	14.000.000
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	BKPSDM Kota Pekalongan	1 Orang	22.069.000	DAU		1 Orang	91.500.000
05.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**		**BKPSDM Kota Pekalongan**		**24.079.000**	**DAU**			**1.820.000.000**
05.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN berkembang kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**55 Persen**	**24.079.000**	**DAU**		**60 Persen**	**1.820.000.000**
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase ASN berkembang kompetensi teknis**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**100 Persen**	**16.575.000**	**DAU**		**100 Persen**	**910.000.000**
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	BKPSDM Kota Pekalongan	1000 Orang	16.575.000	DAU		230 Orang	910.000.000
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Presentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi fungsional, kepemimpinan dan prajabatan**	**BKPSDM Kota Pekalongan**	**7 Persen**	**7.504.000**	**DAU**		**23 Persen**	**910.000.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kota Pekalongan	3 Laporan	7.504.000	DAU		3 Laporan	910.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kota Pekalongan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kota Pekalongan yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama BKPSDM Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kota Pekalongan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Kepegawaian Daerah
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab BKPSDM Kota Pekalongan dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.

Dalam Rencana Kerja BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2027 terdapat 3 Program, 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan, yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan/sub kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan. Perumusan kegiatan/sub kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan BKPSDM Kota Pekalongan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2027 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2027

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BKPSDM		**3.985.081.000**		
URUSAN KEPEGAWAIAN		**3.961.002.000**		
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.764.388.000**	**Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**100 Persen**
			Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	**100 Persen**
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13.782.000**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 Persen**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.470.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.010.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.302.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.169.197.000**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.168.317.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	880.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
C	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**109.169.000**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 Persen**
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.533.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Penyediaan peralatan rumah tangga	910.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.423.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.248.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.055.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan
D	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**429.110.000**	**Persentase ketercapaian penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.010.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	264.300.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
E	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**43.130.000**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.498.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.067.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.565.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit
II	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**196.614.000**	**Persentase keterisian jabatan manajerial ASN**	**95 Persen**
			Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	**73 Persen**
			Persentase peningkatan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan	**27 Persen**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Persentase Pegawai dengan SKP bernilai minimal Baik	**95 Persen**
A	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**33.871.000**	**Persentase ketersediaan data ASN**	**100 Persen**
1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2.023.000	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	31.848.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen
B	**Mutasi dan Promosi ASN**	**120.024.000**	**Persentase ketersediaan data talent pool atau pemetaan talenta ASN**	**85 Persen**
1	Pengelolaan Mutasi ASN	87.235.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	23.637.000	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12 Dokumen
3	Pengelolaan Promosi ASN	9.152.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen
C	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**20.000.000**	**Persentase ASN yang berkembang kompetensinya**	**100 Persen**
1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	20.000.000	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	4 Orang
D	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**22.719.000**	**Tingkat Disiplin ASN**	**100 Persen**
1	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	650.000	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang
2	Pembinaan Disiplin ASN	22.069.000	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1 Orang
URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		**24.079.000**		
III	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**24.079.000**	**Persentase ASN berkembang kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional**	**55 Persen**
A	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**16.575.000**	**Persentase ASN berkembang kompetensi teknis**	**100 Persen**
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara	16.575.000	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1000 Orang

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			
B	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**7.504.000**	**Presentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi fungsional, kepemimpinan dan prajabatan**	**7 Persen**
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7.504.000	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rencana kerja pada tahun 2027 BKPSDM Kota Pekalongan melaksanakan 2 (dua) Urusan Pilihan Penunjang yaitu urusan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan ke dalam 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect)* sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan selama satu tahun ke depan. Renja disusun mengacu pada visi misi Walikota Pekalongan dan berpedoman kepada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2027.

5.1 Catatan Penting

Proses penganggaran dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin, perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pelaksanaannya. Hal ini penting agar penyelenggaraan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Semua program dan kegiatan harus dilaksanakan dengan mengikuti petunjuk serta aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2027, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Substansi Renja BKPSDM Kota Pekalongan disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2027 dan Renstra BKPSDM Kota Pekalongan tahun 2025-2029.

b. BKPSDM Kota Pekalongan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2027 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2027.
c. BKPSDM Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2027 yang berpedoman kepada Renja BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2027 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2027 dengan menganut prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran.
d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2027, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2027.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja BKPSDM Kota Pekalongan selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2027 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BKPSDM. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf BKPSDM Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Untuk dapat merealisasikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2027 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Apabila terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja yang telah direncanakan, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh BKPSDM sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Semoga Renja BKPSDM Tahun 2027 ini menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Pekalongan sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 17 Juli 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKALONGAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19720913 199803 1 001